

Tata Kota Buruk, Penyebab Utama Pemanasan Global

PENATAAN kota yang buruk di kota-kota besar di dunia khusus di Indonesia, menjadi penyebab utama pemanasan global. Wakil Presiden RI (Wapres), Boediono di sela peringatan Hari Habitat Dunia 2011 (HHD), di Istana Wapres, Senin (3/10) mengatakan, kota akan menjadi korban pertama kala level pemanasan global terus meningkat. Sebab, mayoritas kota skala besar dibangun di dekat pantai.

Boediono meminta, para pengelola dan perancang kota besar di Indonesia membenahi tata kota menjadi hemat energi. Pekerjaan membenahi kota yang sudah telanjur tidak terencana seperti di Jakarta, lebih rumit dibandingkan menata kota baru. Lokasi perumahan dan tempat kota yang berjauhan menjadi contoh penggunaan energi tinggi yang akhirnya menyumbang emisi besar. Namun, kondisi ini jangan dibiarkan berlarut, harus dicari solusi.

"Jakarta kota yang sudah telanjur tidak terencana. Karena itu yang paling rumit bagaimana menata yang sudah terlanjur terjadi. Apalagi memang Jakarta ini rumit tetapi tidak boleh kita mengatakan ini sesuatu yang wajar, terjadi apa adanya," katanya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto mengatakan, perubahan iklim memang memberikan pengaruh terhadap pembangunan termasuk perumahan dan permukiman atau habitat. Kementerian PU melalui Ditjen Cipta Karya telah menjalankan program peningkatan kualitas perumahan dan permukiman. Termasuk, mengantisipasi tantangan perubahan iklim antara lain, melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi kawasan kumuh, revitalisasi kawasan dan pengembangan *green building*, serta pengurangan sampah dengan metode 3R (*reuse, reduce, recycle*).

Mitra kerja Kementerian Pekerjaan Umum (PU) seperti Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) membangun rumah susun sederhana (rusuna) dan penanganan lingkungan perumahan kumuh. Upaya ini, ditambah dengan dukungan dunia usaha melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan dan berbagai kegiatan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Fokus kami, mitigasi dan adaptasi. Untuk mitigasi pengelolaan sampah dan limbah khusus menurunkan emisi gas metana, dan pengelolaan bangunan serta lingkungan hemat energi. Sedang, adaptasi dengan mengaktifkan gerakan hemat air dan penanganan sistem drainase yang mampu mengantisipasi dampak ekstrem perubahan iklim."

Djoko mengatakan, tak hanya mengantisipasi perubahan iklim, Kementerian PU juga membangun infrastruktur lain seperti pengembangan air minum berbasis masyarakat (pamsimas) dan sanitasi berbasis masyarakat (sanimas). Juga program pembangunan 250 *twinblock* rusunawa hingga 2014, penanganan kawasan kumuh di 207 kawasan. Lalu, pembangunan infrastruktur air minum di 654 kawasan perkotaan dan 6.573 desa, penanganan air limbah di 210 kawasan, drainase di 197 kabupaten dan kota dan penanganan pelayanan persampahan di 210 kawasan. **Vien Dimiyati**